

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi (Kartasamita, 1996:234-235). Sedangkan menurut Suparlan (1984:12-13), kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat miskin antara lain : rendahnya upah yang diperoleh dari mata pencaharian, besarnya angka pengangguran, tidak adanya harta yang berharga serta tabungan, tidak tersedianya makanan cadangan dan uang tunai, tingginya hal gadai-menggadaikan barang-barang pribadi, hidup yang terbelit hutang, penggunaan pakaian dan barang-barang rumah tangga bekas, serta kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni (Oscar Lewis, 1984).

Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif juga oleh semua pihak, baik itu Pemerintah, Komunitas Peduli, dan

masyarakat itu sendiri¹. Salah satu upaya dari Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan merubah perilaku masyarakat miskin tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Menurut Ife (1995) dalam Nanang Martono (2012:262), konsep pemberdayaan masyarakat adalah sebagai proses menyiapkan masyarakat dalam berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat tersebut.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat dengan PNPM Mandiri, merupakan salah satu program dari Pemerintah dengan mekanisme yang melibatkan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif tersebut. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan prioritas kegiatan untuk kelompok dan lingkungannya, serta mengelola kegiatan sehingga terciptanya kemauan dan rasa memiliki terhadap program dan kegiatan yang dapat meringankan diri mereka dari kemiskinan dan mengubah pola pikir mereka ke arah yang lebih maju.

PNPM Mandiri memiliki program dengan tiga tahap, hingga sampai kepada kegiatan “Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

¹ <http://materibelajar.id/2016/04/teori-kemiskinan-pengertian-definisi.html>, diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 12:00 WIB.

(PLPBK)²”, dimana :

1. Pada tahap pertama, PNPM Mandiri berorientasi untuk membangun pondasi “Masyarakat Berdaya” dengan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menimbulkan perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai Universal.
2. Pada tahap kedua, PNPM Mandiri berorientasi untuk membangun transformasi masyarakat menjadi “Masyarakat Mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah kegiatan pembelajaran kemitraan dan sinergi antara Pemerintah, masyarakat, dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.
3. Pada tahap ketiga, PNPM Mandiri berorientasi untuk membangun transformasi masyarakat menuju “Masyarakat Madani” yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran “Penataan Lingkungan Permukiman secara Komprehensif Berbasis Komunitas (PLPBK) atau *Neighbourhood Development*”.

Intinya, kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan turunan dari PNPM Mandiri, yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan yang teratur, aman dan sehat³, terciptanya masyarakat mandiri, infrastruktur yang baik, dan lingkungan lebih tertata yang nantinya berdampak

² Pengenalan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (2007).

³ Pengenalan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (2007).

pada perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik dan pada peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya PLPBK menjadikan masyarakat mandiri dan memiliki perilaku yang terarah. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap), maupun aktif (melakukan tindakan).

Perilaku masyarakat terbentuk karena pola pikir masyarakat yang teradaptasi dari lingkungannya, salah satunya perilaku ketidak pedulian akan kebersihan di lingkungan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor kemiskinan/ekonomi masyarakat itu sendiri, dan fasilitas sarana dan prasarana yang tergolong kurang memadai. Oleh karena itu, melalui program PLPBK, diharapkan perilaku tersebut dapat diatasi dan peningkatan perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan.

Salah satu masyarakat yang menjalani program PLPBK adalah masyarakat di daerah RW 05 Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dengan bantuan PNPM Mandiri bersama-sama melakukan perencanaan tindakan penataan lingkungan permukiman dengan konsep PLPBK, agar infrastruktur dan lingkungan daerah mereka tertata dengan baik guna mengubah perilaku masyarakat, serta menunjang kegiatan perekonomian masyarakat tersebut. Dengan mempertimbangkan beberapa masalah kompleks mengenai lingkungan mereka yang harus segera dibenahi, seperti permasalahan akses jalan yang masih menggunakan jalan

setapak/tanah, jalan yang harus melalui pematang sawah, serta jalan bersema belukar. Akses kendaraan yang masih sangat sulit, terutama pada angkutan roda empat. Tidak tersedianya fasilitas tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK) warga yang layak, sehingga pada umumnya masyarakat sekitar memilih sungai dan riol (drainase) untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan MCK tersebut.

Kegiatan ini dapat mencemari lingkungan, apalagi pada saat musim kemarau karena saluran air disungai-sungai dan riol tidak selancar pada musim penghujan. Sungai yang sudah terkontaminasi oleh kegiatan MCK warga dapat menimbulkan masalah kesehatan warga itu sendiri, seperti penyakit kulit dan gangguan saluran pernafasan. Berbagai kondisi lingkungan tidak terkendali di daerah RW 05 Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun tersebut, termasuk pengendalian perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan, dimana masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan sehingga terjadinya penumpukan sampah disekitar pemukiman masyarakat. Namun, setelah program PLPBK berjalan, akses jalan ke daerah tersebut sudah membaik dan layak untuk dimasuki oleh kendaraan roda empat. Tersedianya MCK yang layak sehingga merubah perilaku masyarakat akan kebersihan, serta tersedianya tempat-tempat pembuangan sampah yang memadai.

Terlaksananya program PLPBK tersebut tidak lepas dari hubungan kerjasama masyarakat dengan Pemerintah sebagai pengada program PNPM, serta fasilitator yang memfasilitasi dan mendampingi kegiatan. Menurut Sumodiningrat (2009), menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan adanya pendampingan sosial. Nugroho (2001), mengatakan pendamping sebagai

mediator, fasilitator, motivator, transformator, dinamistator dan sebagainya, sehingga terjadi proses *intransfer of knowledge*.

Adanya penerapan program PNPM di daerah RW 05 Sungai Lareh Kelurahan Lubuk Minturun, menyebabkan pentingnya dilakukan penelitian mendalam tentang perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat sekitar sebelum adanya program PNPM dan setelah adanya program PNPM.

